PEMERINTAH KABUPATEN BONE

RENCANA KERJA
TAHUN 2021

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE

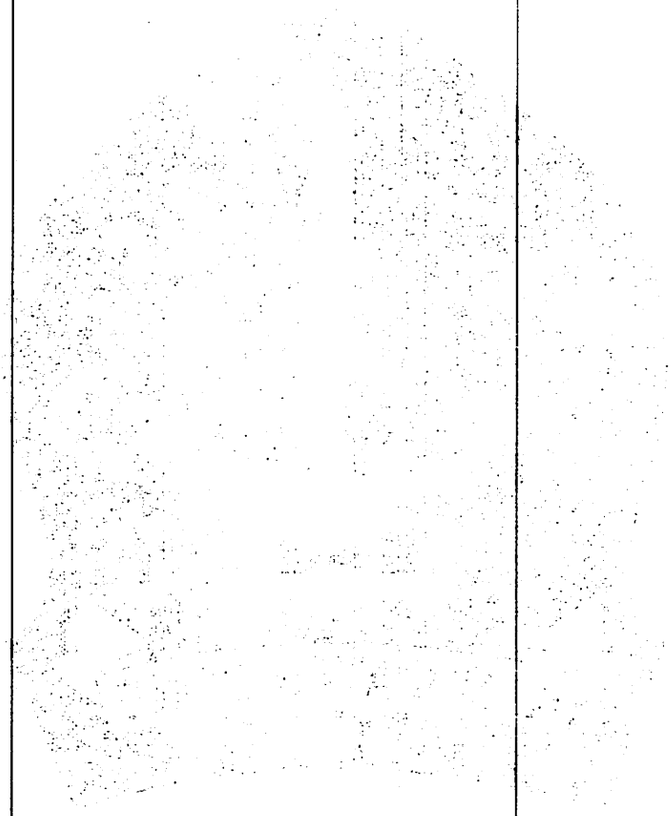

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang keuangan daerah.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- OPD.

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone mengacu pada:

1. Undang- Undang Nomor 29 tahun 1959 tetang pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tenrang Perubaha kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor5679)
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perauran Perundang- Undangan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 -2032 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2)
10. Peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 9 tahun 2016 tentang Peruvbahan Atas Persturan daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005- 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 nomor 3)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanaja daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9)
13. Peraturan Bupati bone nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55)
14. Peraturan Bupati Bone nomor 87, Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Persaturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 31)

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dan untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam mencapai maksud diatas, tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi:

a. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
b. Mengidentifkasi kinerja pelayanan BPKAD.
c. Mengindentifikasi permasalahan dan isu strategis BPKAD 1 (satu) tahun mendatang.
d. Menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target pembangunan BPKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.
e. Menetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang disertai pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun mendatang.
f. Menetapkan rencana kerja dan pendanaan BPKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengemukakan capaian-capaian pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra priode sebelumnya

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil penelaah kebijakan nasional dan rumusan peryataan tujuan dan sasaran beserta indikatornya, serta perumusan program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil perumusan program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program kegiatan BPKAD Kabupaten Bone, selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan

pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kunci BPKAD Kabupaten Bone yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) "**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).**" dengan program strategis pemerintah daerah yaitu: ***Program Penigkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah***, yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu:

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun s/d Tahun 2020

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = Q/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**7,650**	**147,203,254,283**	**1,579**	**26,404,969,950**	**1,491**	**25,939,819,113**	**3,021**	**51,418,424,863**	**39.5**	**34.9**	**BPKAD**	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar	1,805	127,720,018,500	361	22,756,961,450	360	22,717,961,803	721	44,776,806,968	39.9	35.1		Belanja Jasa Kantor Telpon Air dan Listrik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang menerima tunjangan	545	4,118,201,298	58	517,444,800	54	489,820,499	163	833,079,184	29.9	20.2		Belanja Jasa kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Jasa Programmer
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	260	1,365,893,503	52	500,000,000	50	485,240,000	102	795,240,000	39.2	58.2		Belanja Surat kabar maijalah
		Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah SPPD	5,000	3,642,828,112	1,100	737,000,000	1,020	680,039,411	2,020	1,500,238,411	40.4	41.2		Belanja Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = Q/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	40	10,356,312,870	8	1,893,563,700	7	1,566,757,400	15	3,513,060,300	37.5	33.9		ATK Prangko, Materai cetak dan penggandaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Perasarana Aparatur yang kondisi baik**	**675**	**4,825,905,719**	**149**	**1,587,272,600**	**134**	**1,412,364,902**	**269**	**3,134,841,002**	**39.85**	**64.96**	**BPKAD**	
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	25	64,575,000	3	34,500,000	3	34,500,000	8	60,250,000	32.0	93.3		Pengadaan AC
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	190	849,060,800	31	376,800,000	30	367,478,500	68	827,099,500	35.8	97.4		Mesin absensi Komputer printer komputer note book
		Kegiatan Pengadaan Mebeleur	jumlah kebutuhan mebeleur	35	405,825,000	36	176,800,000	35	176,700,000	42	221,700,000	120.0	54.6		Meja Kerja Almari Kursi Tunggu
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	25	588,268,840	4	478,650,600	3	406,068,570	8	828,568,570	32.0	140.8		Alat listrik dan Elektronik belanja Peraalatan Kebersihan dan Pembersih pemeliharaan Ruangan
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	jumlah Mobil dan Motor yang dipelihara	200	1,767,562,800	35	315,000,000	26	238,452,832	66	815,207,932	33.0	46.1		Belanja Bahan Bakar minyak, Penggantian suku cadang, belanja Jasa Servis kendaraan
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	200	1,150,613,279	40	205,522,000	37	189,165,000	77	382,015,000	38.5	33.2		Belanja Jasa Service Peralatan kantor dan Elektronik

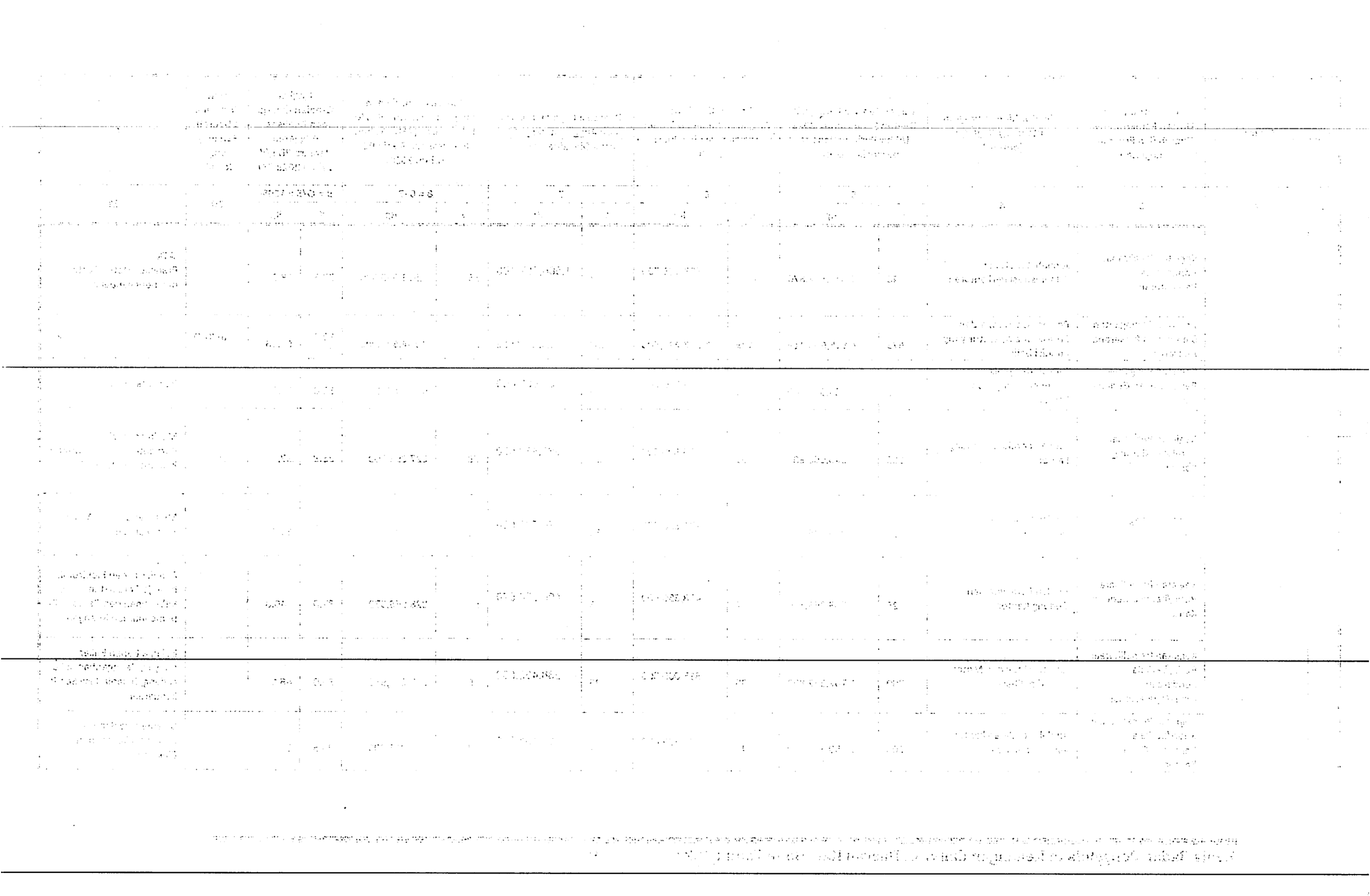

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = Q/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**60**	**214,200,000**	**12**	**117,500,000**	**9**	**92,675,000**	**21**	**112,675,000**	**35.0**	**52.6**	**BPKAD**	
		Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	60	214,200,000.00	12	117,500,000	9	92,675,000	21	112,675,000	35.0	52.6		**Bimtek Aplikas, Bimtek SKP online**
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	**Persentase kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu**	**100**	**557,939,750**	**7**	**300,945,550**	**80**	**271,052,100**	**100**	**499,260,400**	**100.0**	**89.5**	**BPKAD**	
		Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	25	517,386,633	7	107,190,350	5	100,720,600	10	190,465,950	40.0	36.8		Belanja ATK, Jasa Upah operator SIPPD, SIRUP, SIAKUDA,SIPBHP/SIMBMD, Belanja Penggandaan dan Makan Minum
		Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Jumlah SKPD yang Verifikasi	15	557,939,750	66	104,553,000	66	102,782,400	69	201,283,300	460.0	36.1		Belanja ATK, Jasa Tenaga Peneliti, Penggandaan, Makan minum,Perjanan Dinas.
		Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan SISMONTEPRA dan Laporan SPIP	60	709,489,400	24	89,202,200	9	67,549,100	21	107,511,150	35.0	15.2		Honor Tim Pelaksana, ATK, Jasa Upah, PenggNDAAN, Makan minum.
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua)Hari terhadap SP2D yang Terbit**	**37,250**	**1,620,257,621**	**7,500**	**278,337,500**	**6,500**	**242,018,250**	**13,950**	**515,998,000**	**37.45**	**31.85**	**BPKAD**	

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = Q/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Kegiatan Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	37,250	1,620,257,621	7,500	278,337,500	6,500	242,018,250	13,950	515,998,000	37.4	31.8		Belanja ATK, Prangko, Jasa Kantor, Cetak Penggandaan, makan minum, Perjalanan Dinas
		Program Penunjang Pemerintahan Umum	**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu**	**130**	**364,282,811**	**6**	**52,088,500**	**21**	**42,211,700**	**47**	**96,996,700**	**36.2**		**BPKAD**	
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	364,282,811	6	37,778,500	4	32,211,700	10	72,686,700	33.3	20.0		Belanja ATK , Cetak Penggandaan, makan Minum, (Dokumen **RKA,DPA)**
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Informasi yang Diupload	100	130,101,004	25	14,310,000	17	10,000,000	37	24,310,000	37.0	18.7		Regulasi 6 Laporan 5 Profil 4 Pengumuman 4 Sakip 2 Kontak 1
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**92,250**	**29,749,204,434**	**18,385**	**5,501,385,900**	**17,696**	**4,969,480,254**	**36,146**	**10,041,365,354**	**39.2**	**33.8**	**BPKAD**	
		Penyusunan analisis standar Belanja	Jumlah Dokumen Standar Belanja	6	517,550,000	1	160,094,050	1	132,152,250	1	132,152,250	16.7	25.5		Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Makan minum, Perjalanan dinas Luar daerah
		Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	10	651,038,434	2	142,227,500	2	134,555,000	4	242,731,400	40.0	37.3		Belanja Barang Pakai habis, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Pjalanan Dinas,

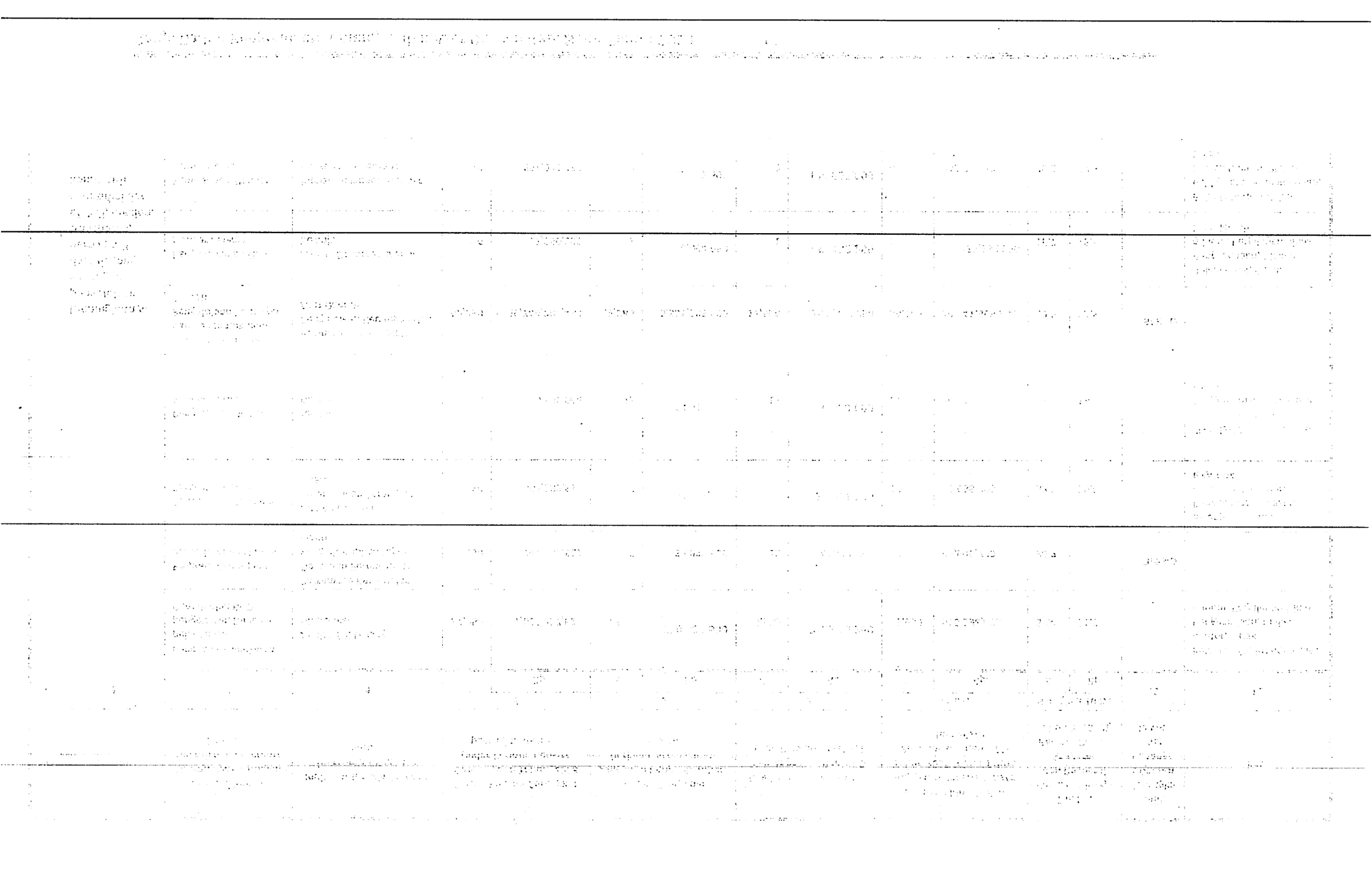

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = Q/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Ranperda APBD	10	1,730,733,656	2	464,069,550	2	451,777,850	4	753,192,850	40.0	43.5		Belanja Pakai Habis, Jasa Kantor, cetak Penggandaan Makan Minum, Perjalanan Dinas
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD	10	1,492,815,869	2	299,569,250	2	279,173,620	4	504,480,670	40.0	33.8		Belanja Pakai Habis, Cetak Penggandaan, makan Minum,
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan	5	1,083,741,363	2	173,099,550	2	172,637,850	3	318,937,850	60.0	29.4		-
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen per KDH tentang Penjabaran Perubahan	5	1,034,368,032	1	208,050,300	1	195,213,750	-	-	-	-		-
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjjawaban	5	1,199,895,540	1	278,756,200	1	272,488,600	-	484,873,150	-	40.4		Belnja Pakai Habis, Penggandaan, Makan Minum, Pejalanan Dinas
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	5	909,749,485	1	214,450,000	1	205,665,080	2	373,961,080	40.0	41.1		Belanja Pakai Habis, , Belna Cetak Penggandaan, Belanja Makan Minum ,
		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya sistem informasi keuangan daerah	5	1,221,044,759	1	235,165,000	1	233,448,800	2	482,928,800	40.0	39.6		**Belanja ATK, Penggandan, Makan Minum, Perjalanan Dinas**

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = Q/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Sosialisasi Peket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	40	1,760,639,974	1	273,726,300	6	189,250,000	14	457,872,050	35.0	26.0		Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum,
		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	15	1,490,340,827	9	235,581,500	3	218,272,441	-	-	-	-		Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum,
		Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksnaan APBD	Jumlah DPA dan DPPA SKPD	660	1,426,354,551	3	328,205,800	132	327,645,363	264	588,661,363	40.0	41.3		Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum, Perjalanan Dinas (Dokumen DPA - DPPA SKPD)
		Pengamanan Aset Daerah	Daftar aset yang dimiliki	330	861,968,590	66	188,134,500	55	157,396,050	121	343,456,550	36.7	39.8		Belanja ATK, cetak penggandaan, Perjalanan Dinas
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	jumlah Dokumen PPAS dan NOTA Keuangan APBD	10	578,025,751	66	77,117,600	2	76,839,250	4	164,911,750	40	28.5		Belanja Pakai habis, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Perjalanan Dinas
		Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA	5	496,621,552	2	128,712,200	1	123,193,000	-	-	-	-		
		Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset	10	654,231,113	1	69,340,950	2	61,648,500	4	141,989,500	40.0	21.7		Belanja Habis Pakai, Belanja Cetak Penggandaan, Makan Minum

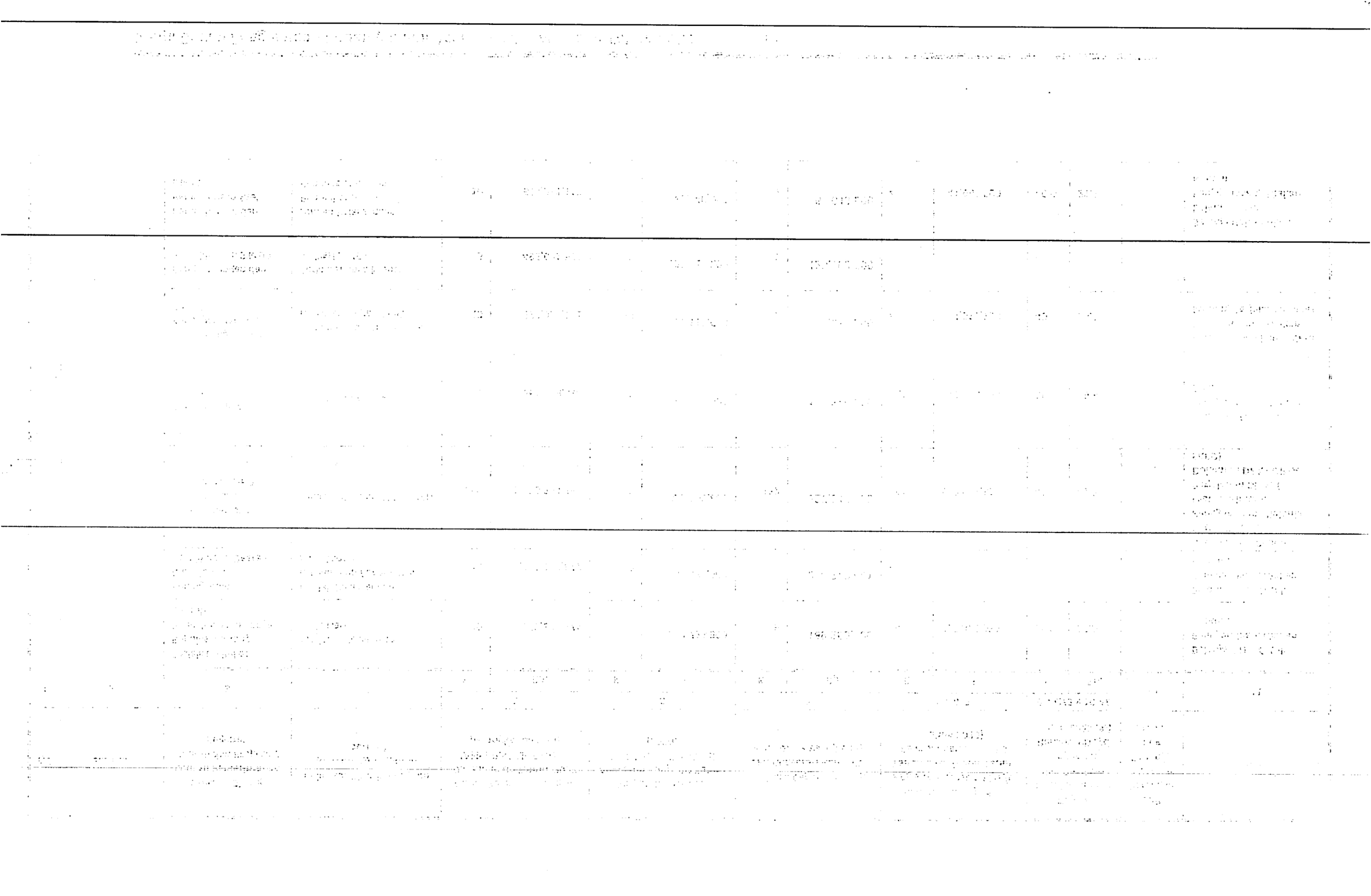

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = Q/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang /jasa	10	371,802,649	2	45,191,000	2	32,047,500	4	95,492,500	40.0	25.7		Belanja Pakai Habis
		Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	jumlah Faktur Pajak	4,100	528,588,670	820	122,560,750	820	122,560,750	1,640	245,121,500	40.0	46.4		Belanja Cetak, Belanja Pakai Habis, Makan Minum
		Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah SKPD yang dinilai	330	613,499,090	66	172,088,800	50	98,100,900	116	215,989,900	35.2	35.2		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Peningkatan Pengelolaan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi pengganggaran	330	2,109,665,840	66	155,920,000	66	149,739,000	132	357,564,000	40.0	16.9		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	60	269,569,280	12	21,601,750	6	15,903,000	18	36,453,000	30.0	13.5		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Jumlah SPM yang terbit	35,000	1,443,994,946	7,000	280,072,550	6,500	266,480,000	13,500	565,552,450	38.6	39.2		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Peningkatan Pelaporan Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	60	1,399,886,803	12	235,395,500	10	209,202,050	22	490,902,050	36.7	35.1		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, (SK.PA, SK Bendahara, Pajak Rokok, Kesehatan Gratis,
		Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	330	1,930,875,837	66	349,233,600	66	325,687,300	132	711,721,300	40.0	36.9		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7		9 = Q/5 x 100%		10	11
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD	3,960	1,023,348,477	792	173,801,000	652	145,397,100	1,444	334,097,900	36.5	32.6		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas
		Pelaporan Aset	Jumlah laporan aset Daerah	10	693,381,107	2	76,871,000	2	67,010,750		200,680,500	40.0	28.9		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan	75	1,138,147,001	15	147,194,700	8	72,229,300	4	223,353,000	30.7	19.6		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan,
		Pengelolaan Gaji	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	46,860	1,634,875,236	9,372	245,155,000	9,300	233,765,200	23	502,940,200	0.0	30.8		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	**Persentase tidak lanjut temuan atas kerugiaan negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR**	**50**	**949,737,329**	**12**	**152,500,000**	**10**	**135,751,794**	**20**	**213,251,794**	**40.00**	**22.5**	**BPKAD**	
		Peningkatan Pelaksanaan TGR	Jumlah Kasus TGR	50	949,737,329	12	152,500,000	10	135,751,794	20	213,251,794	40.0	22.5		Belanja Pakai Habis , Belanja Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Bone, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

2.2.1. Strength (kekuatan)

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bone dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone serta Raperda KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
3. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. Weaknes (kelemahan)

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang)

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran

berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Bone disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi ;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Bone dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (tantangan),

1. Terbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.
2. Masih banyak OPD yang menyajikan Laporan Keuangan dan Aset tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2020

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**97%**	**98%**	**99%**	**100%**	**97%**	**100%**	**99%**	**100%**	
	Jumlah Rekening yang di Bayar			294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	
				20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	
				47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	
	Jumlah ASN yang menerima tunjangan			109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN	109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN	
	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan			52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	
	Jumlah SPPD			1000 SPPD	1100 SPPD	1100 SPPD	1150 SPPD	1000 SPPD	1150 SPPD	1100 SPPD	1150 SPPD	
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran			8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	
2	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur**			**98%**	**99%**	**100%**	**100%**	**98%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Bangunan Gedung Kantor			1 Gedung				1 Gedung				

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas			3 Unit Motor	2 Unit Motor	1 Unit Mobil		3 Unit Motor		1 Unit Mobil		
	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			AC 3 Unit	1 Unit		5 Unit	AC 3 Unit	5 Unit		5 Unit	
	Jumlah Peralatan Rumah Jabtan Dinas			2 Unit				2 Unit				
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 10 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	
				Mesin Ketik 1 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	
				Mesin Absensi 1 Uni	Mesin Absensi 1 Uni	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	Mesin Absensi 1 Uni	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	
				Printer 5 Unit	Printer 6 Unit			Printer 5 Unit				
				UPS 3 Unit				UPS 3 Unit				
				Kulkas 2 Unit				Kulkas 2 Unit				
				Kamera 1 Unit				Kamera 1 Unit				
				Proyektor 1 Unit				Proyektor 1 Unit				
				GPS Pengukur Tanah 1 Unit				GPS Pengukur Tanah 1 Unit				
	Jumlah Kebutuhan Mebelur			7 Unit	Almari 25 Unit	2 Unit	2 Unit	7 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan			1 Paket				1 Paket				
	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor			4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	
	Jumlah Mobil dan Motor			Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	

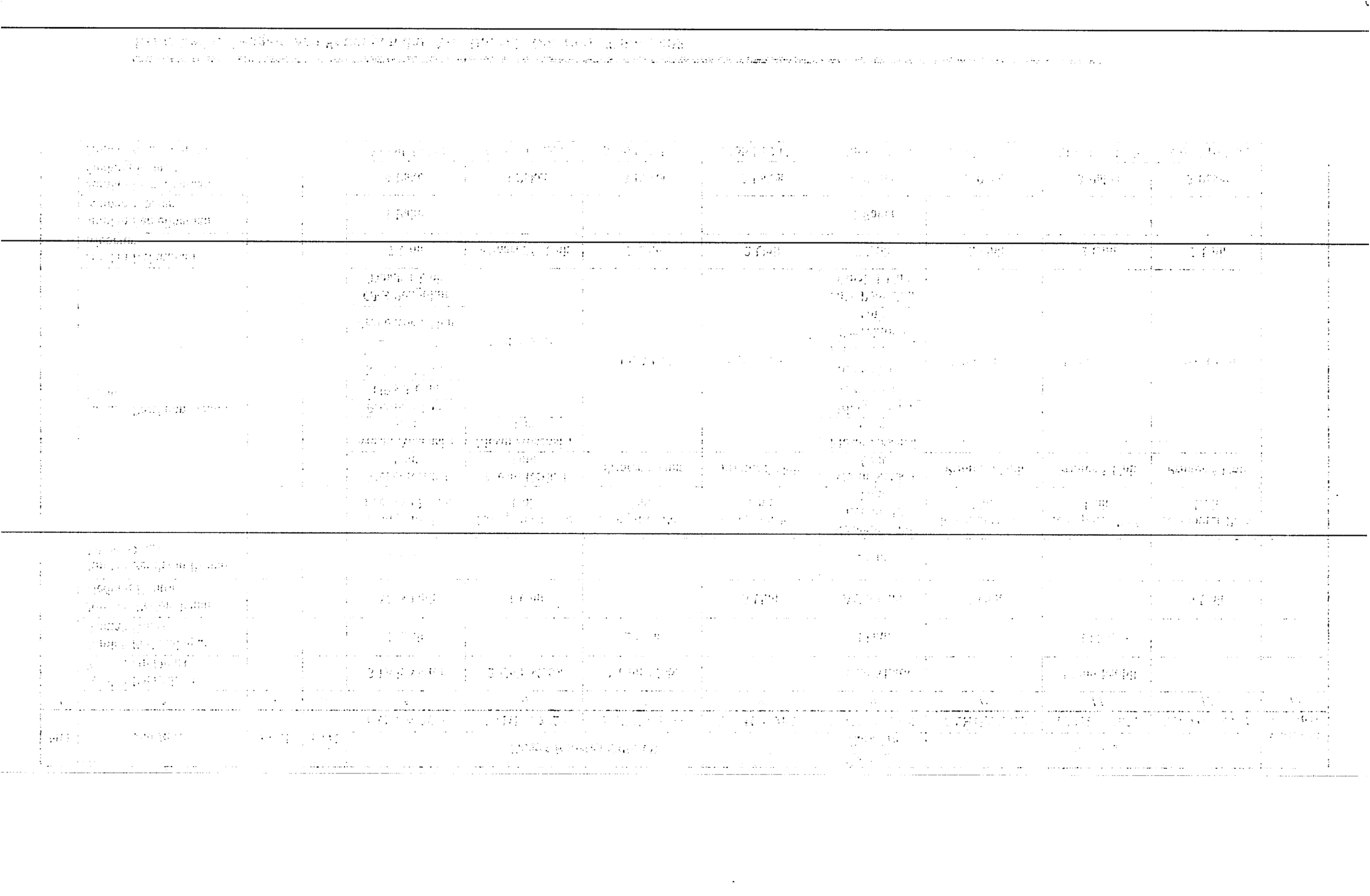

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	yang di Pelihara			33 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	33 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	
	Jumlah Peralatan yang di Pelihara Gedung Kantor			40 Unit	40 Unit	40 Unit	45 Unit	40 Unit	45 Unit	40 Unit	45 Unit	
3	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur**			**95%**	**97%**	**99%**	**100%**	**95%**	**100%**	**99%**	**100%**	
	Jumlah pakaian seragam			110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	
4	**Meningkatnya ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim			1 ASN	2 ASN			1 ASN				
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek			12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	
	Jumlah Peserta StudiBanding			50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak			75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	
5	**Meningkatnya Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu**			**93%**	**95%**	**97%**	**99%**	**93%**	**99%**	**97%**	**99%**	
	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD			5 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Realisasi Semester			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
6	Jumlah Desa RTS			20 Desa				20 Desa				
	Jumlah SKPD yang melakukan Verifikasi SPJ			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan SISMON Tepra Bebasis Online SKPD dan SPIP			24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Acuan Pelaksanaan Program Kegiatan			**93%**	**96%**	**99%**	**100%**	**93%**	**100%**	**99%**	**100%**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Informasi yang diupload			20 Berita	25 berita	25 berita	25 berita	20 Berita	25 berita	25 berita	25 berita	
	Jumlah Pelaksanaan Pameran			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
7	**Presentase SP2D yang diterbitkan Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit**			**98%**	**99%**	**100%**	**100%**	**98%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah SP2D yang diterbitkan			7450 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7450 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	
8	**Penetapan APBD dan APBD P sesuai Ketentuan**			**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	
9	**Presentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual**			**90.13%**	**93.74%**	**97.49%**	**100%**	**90.13%**	**100%**	**97.49%**	**100%**	

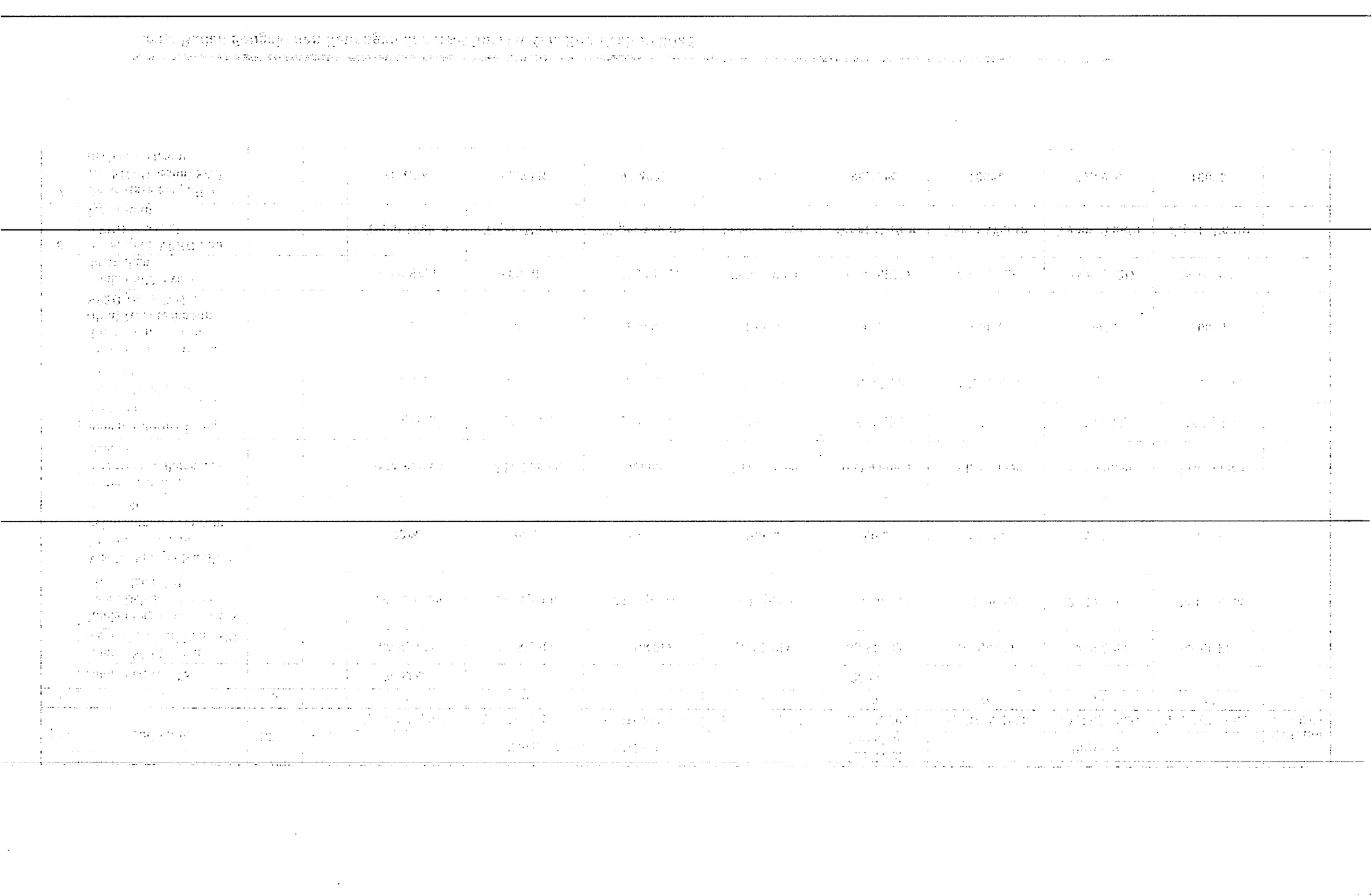

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
10	**Presentase Penyaluran Belanja Daerah**			**98%**	**98%**	**100%**	**100%**	**98%**	**100%**	**100%**	**100%**	
11	**Presentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah Secara Benar**			**77.27%**	**81.82%**	**86.36%**	**90.91%**	**77.27%**	**90.91%**	**86.36%**	**90.91%**	
12	**Presentase Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Standar Satuan Harga Barang/ RKBMD yang disusun dan ditetapkan Tepat Waktu**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
13	**Presentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan**			**29.69%**	**29.78%**	**29.86%**	**29.94%**	**29.69%**	**29.94%**	**29.86%**	**29.94%**	
	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah DokumenPerda APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Jumlah Dokumen perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah			1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi			8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
	Jumlah DPA dan DPPA SKPD			132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	
	Daftar Aset yang dimiliki			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Dokumen Rancangan PPAS APBD dan Rancangan Nota Keuangan APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA			1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Peserta Bimtek/Angkatan			70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Jumlah Faktur Pajak			820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	
	Jumlah SKPD yang diNilai			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penganggaran			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	
	Jumlah SPM yang diterbitkan			7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	
	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaa APBD			792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	
	Jumlah Laporan Aset			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah PNS yang Menerima Gaji			9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	
	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan			15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	
	Jumlah Perda dan Perkada					2 Perda				2 Perda		
14	**Presentae Pengembalian atas Kerugian Negara**			**96%**	**97%**	**98%**	**99%**	**96%**	**99%**	**98%**	**99%**	
	Jumlah Kasus TGR			10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	

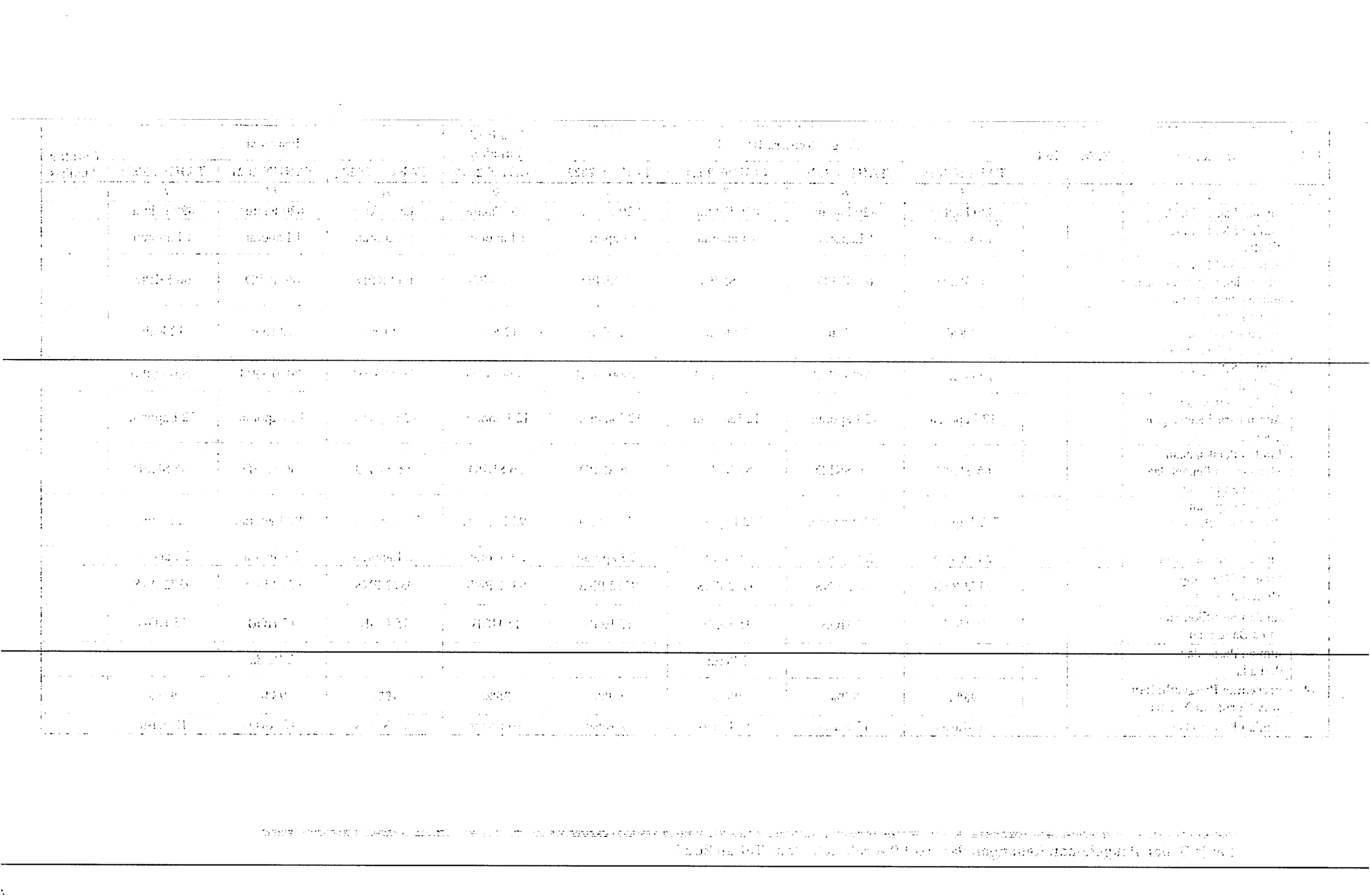

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone

Isu–isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, dan berbasis bermutu
2. Belum tertatanya manajemen aset daerah
3. Belum sepenuhnya laporan keuangan dan aset sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)
4. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios dan lods Pasar Sentral Palakka Watampone belum didukung dengan bukti perikatan, dan pembelian yang telah lunas belum diproses bukti kepemilikannya
2. Sekitar 70% aset pemda belum tersertifikat dan ada beberapa yang belum teridentifikasi serta beberapa aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak
3. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendididkan tentang pengelolaan keuangan
4. Penatausahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang belum tertib sepenuhnya
5. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak tertib
6. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi informasi.

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang semakin mantap berlandaskan pada aturan pengelolaan keuangan yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan;
2. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja;
3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan;
4. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Peningkatan Koordinasi antar OPD dalam rangka menciptakan kebersamaan dalam pencapaian satu tujuan, satu pikiran guna peningkatan pembangunan daerah;
6. Terlaksananya sosialisasi, bintek dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksana teknis kegiatan;
7. Terciptanya *Reward* dan *Punishment* yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah;
8. Penyusunan Kebijakan akuntansi sesuai dengan Juknis Permendagri dan Permenkeu serta Pelaksanaan Sosialisai terkait PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada pelaksana teknis kegiatan;
9. Pengelolaan dan Inventarisasi aset yang tertib dan berbasis Teknologi Informasi serta Peningkatan kualitas SDM khususnya pengurus barang;
10. Inventarisasi aset tetap secara cepat, tepat dan akurat;
11. Penertiban dan persertifikatan Aset Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

11. [illegible]

12. [illegible]

13. [illegible]

14. [illegible]

[illegible]

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**99%**	**27,717,603,200**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**99%**	**27,717,603,200**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. T. Riattang Barat		4332 Rekening	24,250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. T. Riattang Barat		4332 Rekening	24,250,000,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1308 Kali	517,603,200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1308 Kali	517,603,200	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		624 Kali	250,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		624 Kali	250,000,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1100 SPPD	800,000,000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1100 SPPD	800,000,000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T. Riattang Barat		19 Paket	1,900,000,000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T. Riattang Barat		19 Paket	1,900,000,000	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kondisi Baik**	**100%**	**1,593,000,000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kondisi Baik**	**100%**	**1,593,000,000**	

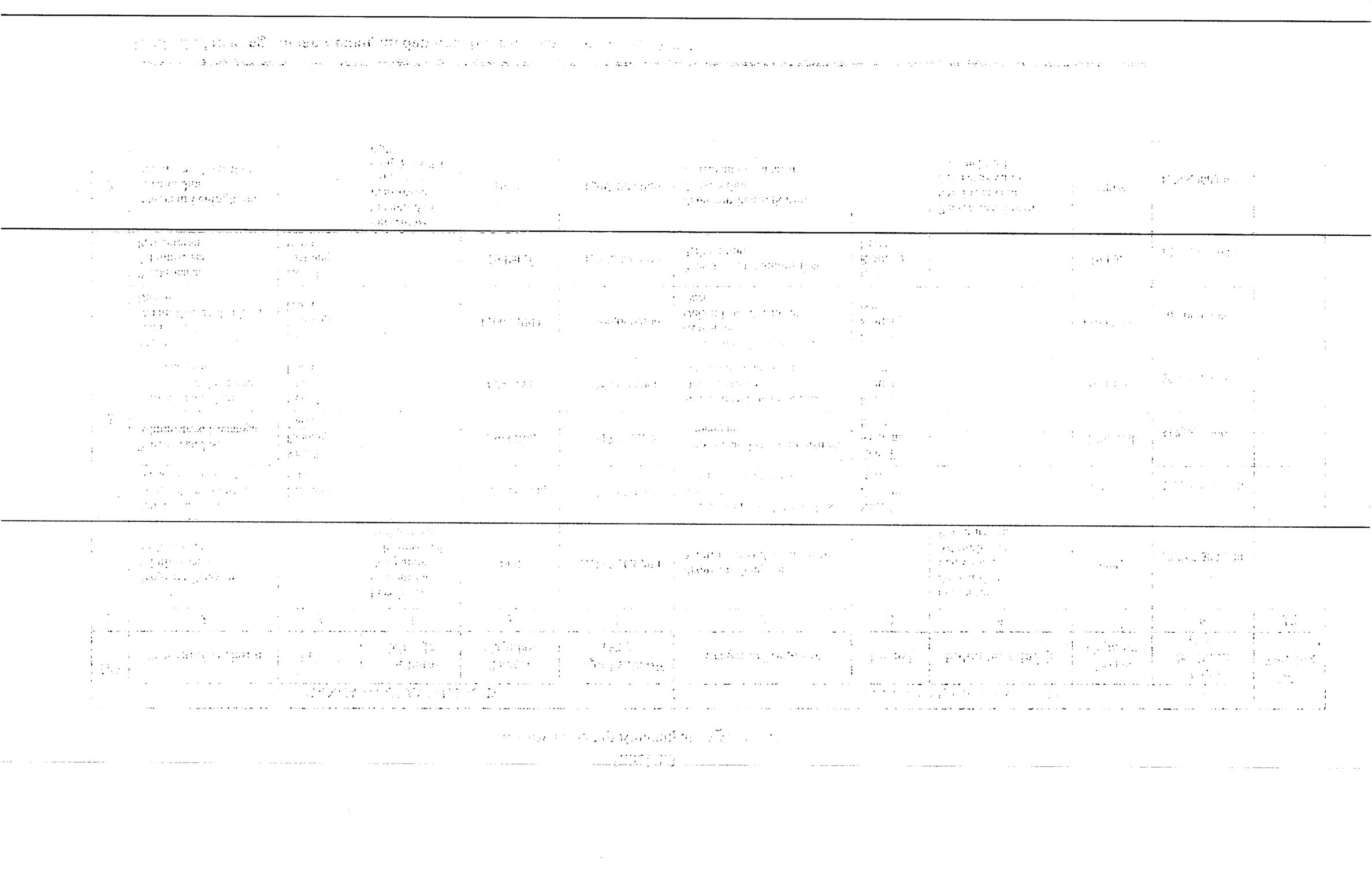

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		1 Paket	100,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		1 Paket	100,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		2 Unit	510,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		2 Unit	510,000,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Unit	25,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Unit	25,000,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		25 Unit	195,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		25 Unit	195,000,000	
	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat		100 Unit	70,000,000	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat		100 Unit	70,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Paket	195,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		3 Paket	195,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		73 Kali	300,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T. Riattang Barat		73 Kali	300,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		200 Kali	198,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat		200 Kali	198,000,000	
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase Kehadiran ASN**	**100%**	**33,000,000**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase Kehadiran ASN**	**100%**	**33,000,000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec. T. Riattang Barat		110 Set	33,000,000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec. T. Riattang Barat		110 Set	33,000,000	
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik**	**100%**	**357,500,000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik**	**100%**	**357,500,000**	
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kec. T. Riattang Barat		3 Orang	69,000,000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kec. T. Riattang Barat		3 Orang	69,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		12 ASN	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat		12 ASN	50,000,000	
	Sosialisasi Pajak	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	38,500,000	Sosialisasi Pajak	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	38,500,000	
	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Luar Provinsi		2 Kegiatan	200,000,000	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Luar Provinsi		2 Kegiatan	200,000,000	
5	**Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetpakna**	**100%**	**264,000,000**	**Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetpakna tepat waktu**	**100%**	**264,000,000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
			tepat waktu								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang Barat		7 Dokumen	80,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang Barat		7 Dokumen	80,000,000	
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Kec. T. Riattang Barat		792 Kali	95,000,000	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Kec. T. Riattang Barat		792 Kali	95,000,000	
	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	89,000,000	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	89,000,000	
6	**Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase SP2D yang terbit Kurang 2 (dua) hari Terhadap SP2D yang terbit**	**100%**	**220,000,000**	**Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase SP2D yang terbit Kurang 2 (dua) hari Terhadap SP2D yang terbit**	**100%**	**220,000,000**	
	Peningkatan Plaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah	Kec. T. Riattang Barat		8126 SP2D	220,000,000	Peningkatan Plaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah	Kec. T. Riattang Barat		8126 SP2D	220,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Program Penunjang Pemerintahan Umum		**Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**122,000,000**	**Program Penunjang Pemerintahan Umum**		**Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**122,000,000**	
7	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		6 Dokumen	37,000,000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		6 Dokumen	37,000,000	
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		25 Berita	15,000,000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang Barat		25 Berita	15,000,000	
	Promosi dan pameran pembangunan	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	Promosi dan pameran pembangunan	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD**	**15.76%**	**6,079,594,000**	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD**	**15.76%**	**6,079,594,000**	
8			**Ketetapan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai ketentuan**	**Tepat Waktu**				**Ketetapan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai ketentuan**	**Tepat Waktu**		
			Persentase Belanja Tidak langsung terhadap total APBD	**50.00%**				**Persentase Belanja Tidak langsung terhadap total APBD**	**50.00%**		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
			Persentase Belanja Pendidikan Terhadap total APBD	21.96%				Persentase Belanja Pendidikan Terhadap total APBD	21.96%		
			Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD secara Benar	86.36%				Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD secara Benar	86.36%		
			Persentase Penyajian LKSKPD sesuai SAP berbasis akrual	97.49%				Persentase Penyajian LKSKPD sesuai SAP berbasis akrual	97.49%		
			Persentase Penyaluran Belanja Daerah	97.59%				Persentase Penyaluran Belanja Daerah	97.59%		
			Persentase SILPA terhadap total APBD	2.41%				Persentase SILPA terhadap total APBD	2.41%		
			Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	29.86%				Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan	29.86%		

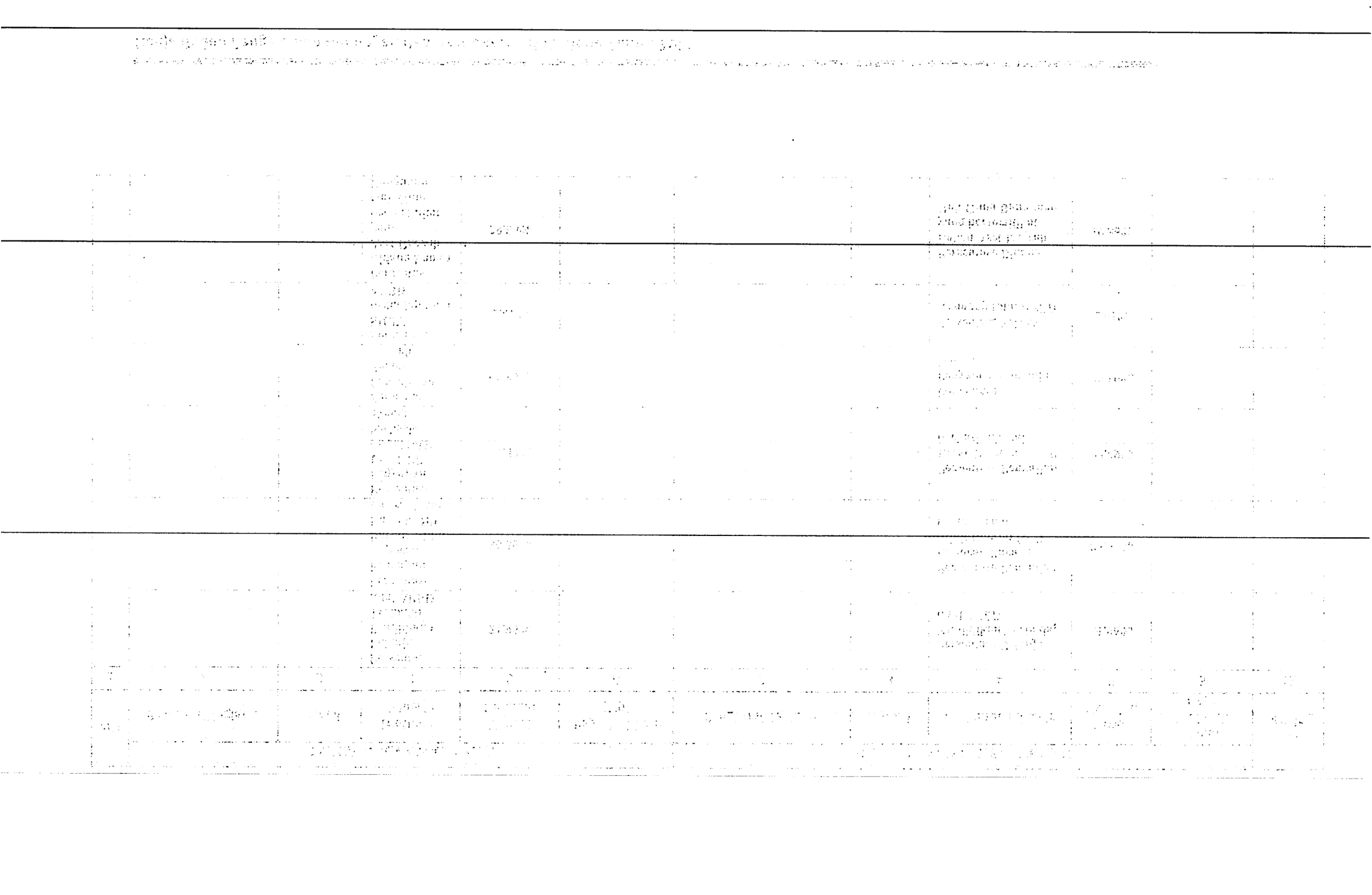

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
			Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD	**50.00%**				**Persentase Belanja Langsung Terhadap APBD**	**50.00%**		
			Persentase Belanja Modal Terhadap APBD	**30%**				**Persentase Belanja Modal Terhadap APBD**	**30%**		
	Penyusunan Analisa Standar Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Analisa Standar Belanja Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Dokumen	100,000,000	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	125,000,000	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	125,000,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	658,718,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	658,718,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	270,400,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	270,400,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	168,250,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	168,250,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	290,850,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	290,850,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	239,200,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	239,200,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	228,592,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	228,592,000	
	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	244,000,000	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	244,000,000	
	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	9 Kegiatan	338,000,000	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	9 Kegiatan	338,000,000	
	Peningkatan Manajemen Aset/ BarangDaerah	Kec. T. Riattang Barat		3 Laporan	256,000,000	Peningkatan Manajemen Aset/ BarangDaerah	Kec. T. Riattang Barat		3 Laporan	256,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		132 DPA/DPPA	235,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		132 DPA/DPPA	235,000,000	
	Pengamanan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	180,000,000	Pengamanan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	180,000,000	
	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	115,544,000	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	115,544,000	
	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	120,640,000	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	120,640,000	
	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		2 Kegiatan	50,000,000	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Kec. T. Riattang Barat		2 Kegiatan	50,000,000	
	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	65,000,000	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec. T. Riattang Barat		2 Dokumen	65,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Kegiatan	70,000,000	
	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1570 Faktur	122,000,000	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1570 Faktur	122,000,000	

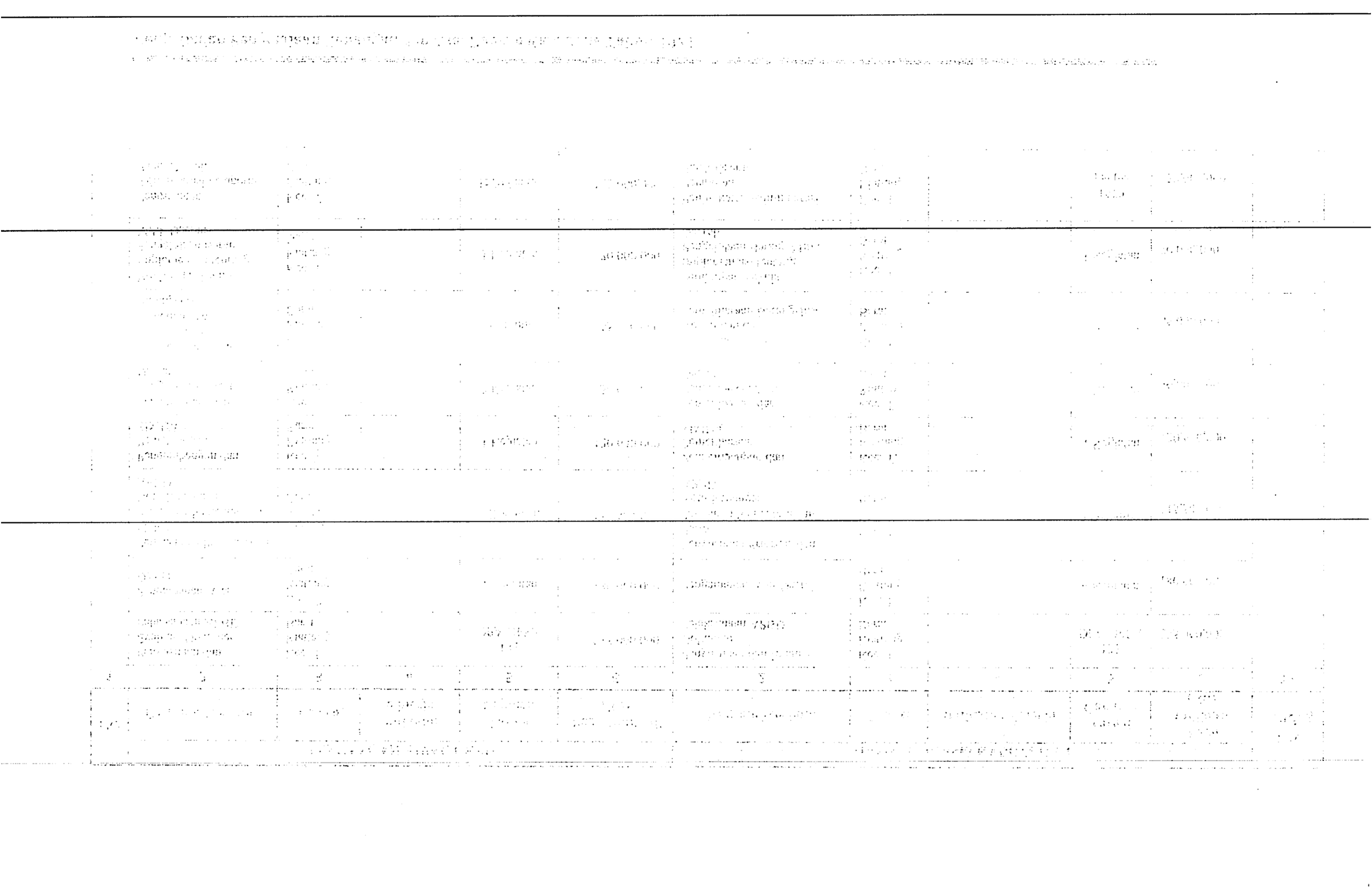

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Laporan	134,000,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. T. Riattang Barat		1 Laporan	134,000,000	
	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	296,400,000	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	296,400,000	
	Pengelolaan administrasi data kearsipankeuangan	Kec. T. Riattang Barat		12 Kali	20,000,000	Pengelolaan administrasi data kearsipankeuangan	Kec. T. Riattang Barat		12 Kali	20,000,000	
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Kec. T. Riattang Barat		5025 SPM	280,000,000	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Kec. T. Riattang Barat		5025 SPM	280,000,000	
	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	257,000,000	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		12 Laporan	257,000,000	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	350,000,000	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T. Riattang Barat		4 Kegiatan	350,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		792 Laporan	198,000,000	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T. Riattang Barat		792 Laporan	198,000,000	
	Pelaporan Aset	Kec. T. Riattang Barat		2 Laporan	130,000,000	Pelaporan Aset	Kec. T. Riattang Barat		2 Laporan	130,000,000	
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Kec. T. Riattang Barat		15 HGB	142,000,000	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Kec. T. Riattang Barat		15 HGB	142,000,000	
	Pengelolaan Gaji	Kec. T. Riattang Barat		112464 PNS	245,000,000	Pengelolaan Gaji	Kec. T. Riattang Barat		112464 PNS	245,000,000	
	Penyusunan Ramperda dan Ranperkada terkait pengelolaan keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Ramperda dan Ranperkada terkait pengelolaan keuangan	Kec. T. Riattang Barat		1 Dokumen	150,000,000	
9	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**Persentase tindak lanjut temuan kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR**	**98%**	**160,000,000**	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**Persentase tindak lanjut temuan kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR**	**98%**	**160,000,000**	

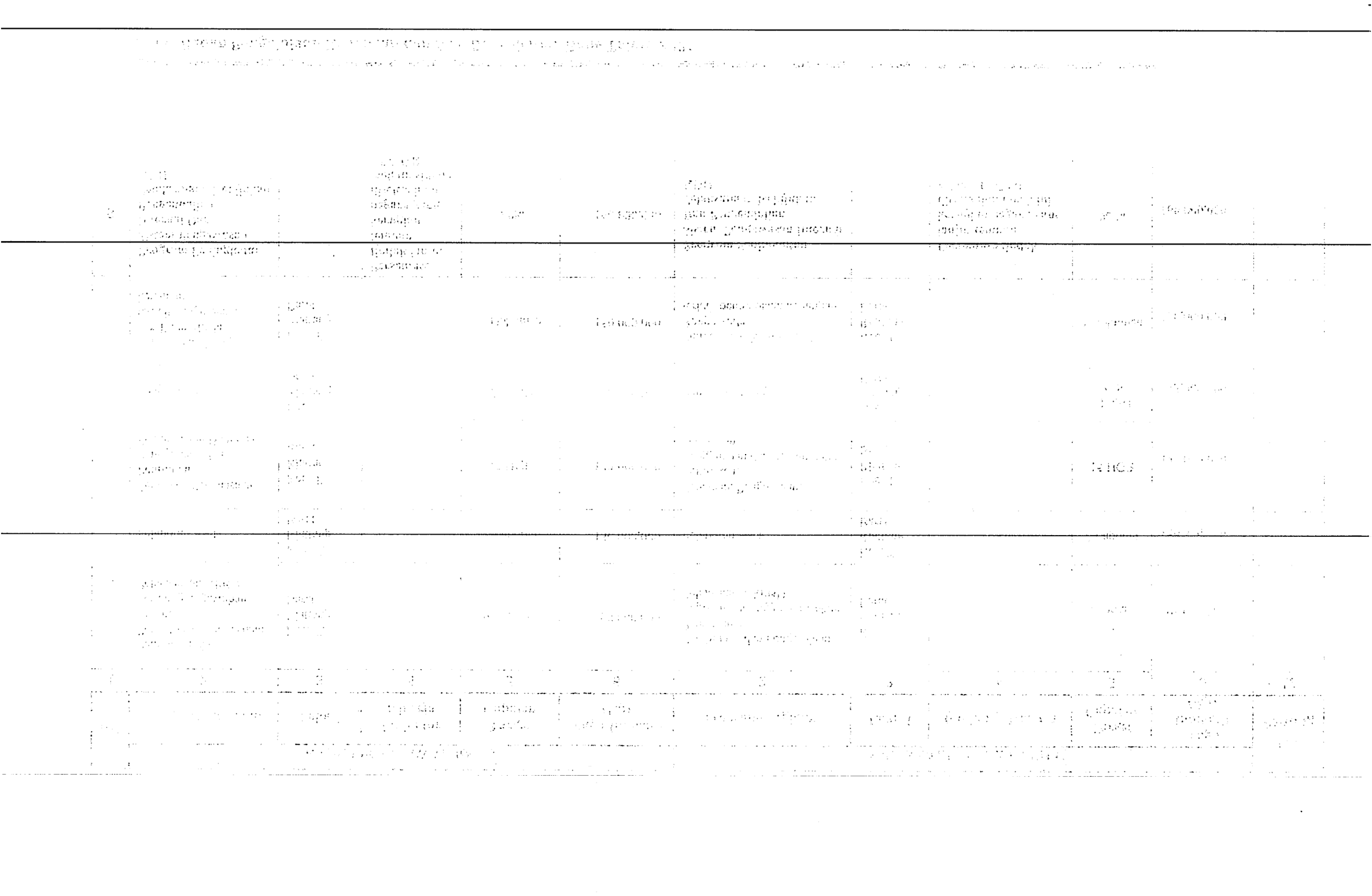

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Kec. T. Riattang Barat		12 Kasus	160,000,000	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Kec. T. Riattang Barat		12 Kasus	160,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 89 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2020 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Namun demikian terkait dengan usulan alokasi untuk hibah bansos, BPKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasar rekomendasi di OPD yang sesuai kewenangannya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI

Adapun Visi Kementerian Dalam Negeri RI adalah *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Berdasarkan Visi tersebut Kemendagri merumuskan tujuan yaitu diantaranya *"Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah"*, dengan sasaran strategis meningkatkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetititf.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Kemendagri RI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif.
   Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.
   Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien
   Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
   Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.
   Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemendagri RI telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategis sebagai berikut:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
2. Mendorong penetapatan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi /Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
3. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
4. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah
5. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
6. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
7. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fisikal daerah;

Mengkaji visi dan misi Kementerian Dalam Negeri RI memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone secara tepat waktu;
2. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja pada pelayanan masyarakat, terutama bidang infrastruktur 5%, bidang kesehatan 10%, dan bidang pendidikan 20%; dan
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan fiscal daerah.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Telaah Renstra Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan RI yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

a. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;

b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:

1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;

2) Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);
3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;
6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energy;
7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah;

1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi- fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap danadekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
3) Mengembangkan system transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;

6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;
7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar.

Telaah Renstra Badan Pemeriksa Keuangan RI

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut:

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, melalui strategi:

Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu:

a. Komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;
b. Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan

kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada

Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah *"Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel"*. Berdasarkan Tujuan tersebut BPKD Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran yaitu *"Optimalisasi Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah"*.

Telaahan Renstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 24 kabupaten/kota se sulawesi selatan
2. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih

Indikator : 1. Nilai SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB
2. Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif.

Tabel. 3.2
Matrix Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/	Pelayanan administrasi perkantoran	Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
	barang dacrah dalam penyelenggaraa n tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih Indikator: 1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP BPKAD	dalam penyelenggara an pemerintahan daerah	Kcmcnpan RB	Pcningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mcningkatnya pcmcnuhan kebutuhan saranan dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas
				Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
				Penigkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya ASN yang memahami tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik
				Peningktatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu
				Penunjang Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas dokumen acuan pelaksanaan program kegiatan
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif	Opini BPK-RI berdasarkan hasil audite terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase SP2D yang terbit kurang 2 (dua) hari terhadap SP2D yang terbit
				Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD
					Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual
					Persentase penyaluran belanja daerah
					Persentase penyajian laporan Barang Milik Daerah secara benar serta kinerja pengelolaan barang
					Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat hak guna bangunan
				Penigkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan KDH	Presentase pengembalian atas kerugian negara

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kabupaten Bone. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BPKAD)

mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daearah dengan memerhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. Pemerintahan provinsi /Kabupaten /Kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah dengan tetap memerhatikan RPJMD.
2. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penataan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melangggar ketentuan perundang-undagan dibidang pengelolaan keuangan sendiri.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan ,serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan system akuntansi pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan pada upaya –upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK RI;
5. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memerhatikan petunjuk teknis kementrian /lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teresebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang koordianasi penyusunan petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
6. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintahan daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah;
7. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten /kota ke provinsi dan kepusat atau sebaliknnya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program dan kegiatan bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

2. **Administrasi Keuangan**
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   3) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
   4) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
   5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. **Administrasi Umum**
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   7) Penyediaan Makanan dan Minuman
   8) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
   9) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
   10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   11) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   12) Pengadaan Mebeleur
   13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
   16) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4. **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
   2) Pengadaan Pakaian Korpri
   3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
   4) Pendidikan dan Pelatihan Formal
   5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

8. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pengadaan Mebel
4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

12. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1) Penyusunan KUA dan PPAS
2) Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3) Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
4) Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
5) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
6) Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
7) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
8) Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
9) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

13. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1) Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2) Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D

3) Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
4) Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
7) Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

14. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
4) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
6) Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
7) Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

15. Kegiatan Penunjang Urusan

1) Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

16. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11) Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

17. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

18. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

19. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

20. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
2) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
3) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
4) Penatausahaan Barang Milik Daerah
5) Inventarisasi Barang Milik Daerah
6) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
7) Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
8) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
9) Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

10) Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

21. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Penyusunan Standar Harga
2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4) Pengamanan Barang Milik Daerah
5) Penilaian Barang Milik Daerah
6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
8) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone. Rencana kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan unit kerja. Secara keseluruhan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2021 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 547.401.593.870,00,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi, sebesar Rp.*73.018.290.730,00* dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan daerah dan iuran Askzes PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Belanja Modal sebesar Rp.*470.405.000,00*
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. *20.000.000.000,00*
4. Belanja Transfer sebesar Rp. *453.912.898.140,00*

Tabel.4.1
Rencana Belanja BPKAD Tahun 2021

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Operasi	73.018.290.730,00	13,34%
2	Belanja Modal	470.405.000,00	0,09%
3	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	3,65%
4	Belanja Transfer	453.912.898.140,00	82,92%
	JUMLAH	**547.401.593.870,00**	**100.00**

Band IV

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					73,018,290,730.00	**470,405,000.00**	**20,000,000,000.00**	**453,912,898,140.00**	**547,401,593,870.00**	**602,141,753,257.00**
	BIDANG SEKRETARIAT BPKAD								**63,831,365,650.00**	**70,214,502,215.00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				63,360,960,650.00	470,405,000.00	-	-	63,831,365,650.00	70,214,502,215.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				389,502,350.00	-	-	-	389,502,350.00	428,452,585.00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	177,495,450.00	-	-	-	177,495,450.00	195,244,995.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	28,948,500.00	-	-	-	28,948,500.00	31,843,350.00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23,241,000.00	-	-	-	23,241,000.00	25,565,100.00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20,311,100.00	-	-	-	20,311,100.00	22,342,210.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	99,363,300.00	-	-	-	99,363,300.00	109,299,630.00

| | | |

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40,143,000.00	-	-	-	40,143,000.00	44,157,300.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40,262,760,430.00	-	-	-	40,262,760,430.00	44,289,036,473.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40,262,760,430.00	-	-	-	40,262,760,430.00	44,289,036,473.00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	355,761,000.00	-	-	-	355,761,000.00	391,337,100.00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	125,500,000.00	-	-	-	125,500,000.00	138,050,000.00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30,261,000.00	-	-	-	30,261,000.00	33,287,100.00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	220,000,000.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,645,501,340.00	-	-	-	2,645,501,340.00	2,910,051,474.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	435,646,600.00	-	-	-	435,646,600.00	479,211,260.00

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	125,436,720.00	-	-	-	125,436,720.00	137,980,392.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	693,389,520.00	-	-	-	693,389,520.00	762,728,472.00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	273,558,500.00	-	-	-	273,558,500.00	300,914,350.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00	330,000,000.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	817,470,000.00	-	-	-	817,470,000.00	899,217,000.00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	470,405,000.00	-	-	470,405,000.00	517,445,500.00
			Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	15,500,000.00	-	-	15,500,000.00	17,050,000.00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	454,905,000.00	-	-	454,905,000.00	500,395,500.00

| | | |

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19,113,022,260.00	-	-	-	19,113,022,260.00	21,024,324,486.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	59,032,000.00	-	-	-	59,032,000.00	64,935,200.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18,281,670,260.00	-	-	-	18,281,670,260.00	20,109,837,286.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	772,320,000.00	-	-	-	772,320,000.00	849,552,000.00
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			594,413,270.00	-	-	-	594,413,270.00	653,854,597.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	262,746,000.00	-	-	-	262,746,000.00	289,020,600.00
			Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25,535,470.00	-	-	-	25,535,470.00	28,089,017.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	186,000,000.00	-	-	-	186,000,000.00	204,600,000.00

No	RENCANA TAHUN 2021								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120,131,800.00	-	-	-	120,131,800.00	132,144,980.00
	BIDANG ANGGARAN								**3,352,858,800.00**	**3,688,144,680.00**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				8,340,835,450.00	-	20,000,000,000.00	453,912,898,140.00	482,253,733,590.00	530,479,106,949.00
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3,352,858,800.00	-	-	-	3,352,858,800.00	3,688,144,680.00
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	182,352,250.00	-	-	-	182,352,250.00	200,587,475.00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	179,696,250.00	-	-	-	179,696,250.00	197,665,875.00
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	136,673,000.00	-	-	-	136,673,000.00	150,340,300.00
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	136,673,200.00	-	-	-	136,673,200.00	150,340,520.00
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	151,688,000.00	-	-	-	151,688,000.00	166,856,800.00

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	151,689,100.00	-	-	-	151,689,100.00	166,858,010.00
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,184,647,600.00	-	-	-	1,184,647,600.00	1,303,112,360.00
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	566,133,200.00	-	-	-	566,133,200.00	622,746,520.00
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	438,676,550.00	-	-	-	438,676,550.00	482,544,205.00
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	64,536,000.00	-	-	-	64,536,000.00	70,989,600.00
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	160,093,650.00	-	-	-	160,093,650.00	176,103,015.00
	BIDANG PERBENDAHARAAN								**1,706,041,450.00**	**1,876,645,595.00**
8			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1,706,041,450.00	-	-	-	1,706,041,450.00	1,876,645,595.00

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	252,951,800.00	-	-	-	252,951,800.00	278,246,980.00
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	298,200,700.00	-	-	-	298,200,700.00	328,020,770.00
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	160,152,500.00	-	-	-	160,152,500.00	176,167,750.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	247,725,000.00	-	-	-	247,725,000.00	272,497,500.00
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	132,559,750.00	-	-	-	132,559,750.00	145,815,725.00

| | | |

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	216,244,000.00	-	-	-	216,244,000.00	237,868,400.00
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	349,233,800.00	-	-	-	349,233,800.00	384,157,180.00
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48,973,900.00	-	-	-	48,973,900.00	53,871,290.00
	BIDANG AKUNTANSI								**1,281,935,200.00**	**1,410,128,720.00**
9			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1,281,935,200.00	-	-	-	1,281,935,200.00	1,410,128,720.00
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	230,263,600.00	-	-	-	230,263,600.00	253,289,960.00
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	248,845,300.00	-	-	-	248,845,300.00	273,729,830.00

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	493,718,400.00	-	-	-	493,718,400.00	543,090,240.00
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	87,915,800.00	-	-	-	87,915,800.00	96,707,380.00
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	67,031,200.00	-	-	-	67,031,200.00	73,734,320.00
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	154,160,900.00	-	-	-	154,160,900.00	169,576,990.00
	BENDAHARA BANTUAN								**475,912,898,140.00**	**523,504,187,954.00**
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2,000,000,000.00	-	20,000,000,000.00	53,912,898,140.00	475,912,898,140.00	523,504,187,954.00

| | | |

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,000,000,000.00	-	-	446,196,378,100.00	448,196,378,100.00	493,016,015,910.00
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	20,000,000,000.00	-	20,000,000,000.00	22,000,000,000.00
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	7,716,520,040.00	7,716,520,040.00	8,488,172,044.00
	BIDANG ASET								**1,316,494,630.00**	**1,448,144,093.00**
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,316,494,630.00	-	-	-	1,316,494,630.00	1,448,144,093.00
11	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1,316,494,630.00	-	-	-	1,316,494,630.00	1,448,144,093.00
			Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	186,845,150.00	-	-	-	186,845,150.00	205,529,665.00
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	96,864,340.00	-	-	-	96,864,340.00	106,550,774.00
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	157,210,250.00	-	-	-	157,210,250.00	172,931,275.00
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	218,086,800.00	-	-	-	218,086,800.00	239,895,480.00

No	RENCANA TAHUN 2021									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				Jumlah	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
			Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	174,299,200.00	-	-	-	174,299,200.00	191,729,120.00
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	113,107,800.00	-	-	-	113,107,800.00	124,418,580.00
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200,009,340.00	-	-	-	200,009,340.00	220,010,274.00
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	170,071,750.00	-	-	-	170,071,750.00	187,078,925.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja BPKAD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja BPKAD tahun 2021 merupakan menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah tahun kedua RPJMD dan Renstra BPKAD tahun 2018-2023 ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja BPKAD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bone

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Watampone, 25 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE

H. NAJAMUDDIN, S.Sos.,MM
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19631007 198611 1 002